



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG

RENCANA KERJA TAHUN 2025



dikbud@pangkalpinang.go.id



JL.RASAKUNDA KEL.BATUINTAN GIRIMAYA
KOTA PANGKALPINANG

dikbud_Pgk

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan rangkaian pelaksanaan Renstra Tahun kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk periode Renstra 2024-2026. Penyusunan dokumen ini merupakan implementasi dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yang menjadi peraturan. Sebagai perangkat daerah yang taat azas perencanaan pembangunan, keberadaan Dokumen Renja merupakan perpanjangan implementasi dari Dokumen Renstra yang disusun dengan mempertimbangkan aspek strategis seperti program prioritas daerah, Amanat Pencapaian SPM Pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan pendidikan di Kota Pangkalpinang yang sesuai dengan peraturan terkait. Seluruh program dan kegiatan yang tercantum di dalam Dokumen Renja Tahun 2025 sudah menterjemahkan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah tersusun di dalam Renstra, khusus untuk tahun 2025.

Dokumen Renja ini memuat beberapa hal penting terkait program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Dokumen ini merupakan langkah awal yang nantinya menjadi dasar penentuan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota pangkalpinang, dan menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai penggerak motor pendidikan dan kebudayaan di Kota Pangkalpinang. Di akhir penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025 ini, kami mengucapkan Alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami selama penyusunan Renja ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renja ini bermanfaat dalam upaya memajukan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pangkalpinang tercinta ini.

Pangkalpinang, Juli 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG,**



**ERWANDY, SE., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207202006041004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	59
3.3. Program dan Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB V PENUTUP.....	80
5.1. Catatan-catatan Penting.....	80
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	82
5.3. Rencana Tindak Lanjut	83

DAFTAR TABEL

Tabel TC 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 kota Pangkalpinang	12
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Tahun 2023.....	23
Tabel 2.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26
Tabel TC 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	36
Tabel 3.1	Rumusan Tujuan.....	59
Tabel 3.2	Keselaran Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	60
Tabel 3.3	Sasaran dan Target Indikator Sasaran.....	61
Tabel TC 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2025.....	65
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat menjadi Renja Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari penjabaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2024 – 2026. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Renja wajib disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun anggaran 2025. Renja merupakan penterjemahan dari program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 – 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Dalam penyusunan Renja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang yang menjadi koordinator perencanaan di Kota Pangkalpinang dan juga dengan para pemangku kepentingan. Merujuk pada pasal 16 (enam belas) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025, tema pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yaitu **"Pemerataan Kesejahteraan**

dan Daya Saing Sumber Daya Manusia". Berdasarkan tema tersebut, maka tahun 2025 pembangunan Kota Pangkalpinang fokus utama pembangunannya adalah aspek pembangunan kesejahteraan sosial dan SDM. Pada tahun 2025 pemerintah Kota Pangkalpinang berfokus pembangunan pada peningkatan kualitas SDM dan beberapa bidang yang memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. Mengacu kepada rancangan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025-2045, tahun 2025 juga akan memfokuskan pada "PELETAKAN PONDASI AWAL" pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sebagai penopang seluruh aspek pembangunan. Untuk mendukung misi (agenda) pembangunan nasional 2045 **TRANSFORMASI SOSIAL**, RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menjadi tahun awal upaya pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Untuk mendukung misi (agenda) pembangunan nasional 2045 **TRANSFORMASI EKONOMI**, RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menjadi tahun awal upaya peningkatan hilirisasi, pemantapan kawasan-kawasan industri, penguatan komoditas unggulan, serta penyiapan kompetensi tenaga kerja. Untuk mendukung misi (agenda) pembangunan nasional 2045 **TRANSFORMASI TATA KELOLA**, RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menjadi tahun awal upaya penataan kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, kualitas ASN berbasis merit, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Dalam rangka mendukung perwujudan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam hal peningkatan kesejahteraan dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan bidang pendidikan tetap mendapat prioritas dalam hal mempersiapkan pendidikan dasar yang berkualitas guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula, sehingga pada akhirnya dapat mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini dikarenakan pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang krusial dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan

pendidikan tapi juga harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Sebagai eksekutor kebijakan Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsi yang mendukung prioritas pembangunan terkait peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan daya saing dan pelestarian budaya daerah. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, dimana salah satunya adalah menyediakan akses pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama bagi seluruh penduduk usia sekolah di Kota Pangkalpinang yang belum terlayani, selain itu juga meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pada bidang kebudayaan, tantangan utama yang harus diselesaikan adalah upaya untuk mengembangkan dan melindungi cagar budaya daerah, mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah, melestarikan sejarah dan tradisi budaya daerah, serta melestarikan budaya melayu melalui event khusus terkait hal dimaksud.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091),
2. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);

23. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
27. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
28. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 1144).
29. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun kedua Renstra. Dengan adanya dokumen Renja, pencapaian sasaran yang tercantum

dalam Renstra diharapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien, sehingga pencapaian terhadap visi misi Kepala Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat dicapai dengan maksimal. Selain itu, penyusunan Renja Tahun 2025 juga bertujuan untuk melengkapi rangkaian penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, dimana Renja organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bagian penting yang terkandung di dalamnya. Renja Tahun 2025 memuat uraian detail program – program dan kegiatan yang direncanakan akan direalisasikan di tahun 2025 sesuai dengan proyeksi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, sebagai upaya mendukung kesuksesan pelaksanaan program-program prioritas kepala daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 meliputi bagian – bagian sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Landasan hukum
 - 1.3. Maksud dan tujuan, dan
 - 1.4. Sistematika penulisan
- BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023
 - 1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

	1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.4. Review Terhadap Rencana Awal OPD
	1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	1.2. Tujuan dan Sasaran Renja
	1.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mencantumkan pembahasan atas Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga tahun 2023. Untuk itu pada bagian ini dijabarkan hasil kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Hasil yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam renja – renja tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja pada tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau realisasi APBD untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun pokok-pokok materi yang akan dirangkum dalam tabel yang akan dijabarkan setelah ini memuat poin – poin diantaranya :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Keenam uraian di atas dijabarkan dalam tabel T.C 29 berikut ini :

Tabel T.C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pangkalpinang

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab							
								I				II				III								IV						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	P	Rp	K	P	Rp	K	P	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	-	010101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Aparatur Pemerintahan (Dinas Satuan Kerja)	100	336.670.926.731	0	0	100	143.374.778.244	11	11	19.885.735.117	100	37.520	41.340.376.421	100	71.830	30.243.056.893	100	100	40.809.794.008	100	132.298.962.739	100	132.298.962.739	100	39.296	Sekretariat Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dinas Satuan Kerja)	100		0		100		11	11		100	37.520		100	71.830		100	100		100		100		100		Sekretariat Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi Kualifikasi Akademik dan Kejuruan (Dinas Satuan Kerja)	100		0		100		11	11		100	37.520		100	71.830		100	100		100		100		100		Sekretariat Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase laporan kinerja jabatan yang disampaikan waktu (Dinas Satuan Kerja)	100		0		100		11	11		100	37.520		100	71.830		100	100		100		100		100		Sekretariat Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2		01010201	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (Dinas Satuan Kerja)	0	160.760.000	0	0	7	48.541.306	0	11	0	5	19.296	0	7	90.716	37.701.590	7	100	6.236.500	7	43.938.050	7	43.938.050	100	27.417	Kasubag PEP	Kasubag PEP
3		0101020101	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah (Dinas Satuan Kerja)	0	42.750.000	0	0	2	19.206.196	0	25	0	1	25	0	2	100	5.618.250	2	100	6.236.500	2	11.874.750	2	11.874.750	100	27.777	Subkontraktor Kesenian dan Perfilman	Kasubag PEP
4		0101020102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen KA-SKP	Jumlah Dokumen KA-SKP Dokumen KA-SKP (Dinas Satuan Kerja)	0	0	0	0	1	3.260.000	0	0	0	0	25	0	0	100	3.260.000	1	100	0	1	3.200.000	1	3.260.000	100	100	Kasubag PEP	Kasubag PEP
5		0101020103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan KA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan KA-SKP Dokumen Perubahan KA-SKP (Dinas Satuan Kerja)	0	0	0	0	1	5.360.000	0	0	0	0	20	0	1	100	5.360.000	1	100	0	1	5.300.000	1	5.360.000	100	100	Kasubag PEP	Kasubag PEP
6		0101020104	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PA-SKP	Jumlah Dokumen PA-SKP Dokumen PA-SKP (Dinas Satuan Kerja)	0	32.750.000	0	0	1	10.230.506	0	25	0	1	55	0	1	100	8.990.650	1	100	0	1	8.990.650	1	8.990.650	100	27.452	Kasubag PEP	Kasubag PEP
7		0101020105	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKP	Jumlah Dokumen DPA-SKP Dokumen DPA-SKP (Dinas Satuan Kerja)	0	21.740.000	0	0	1	5.370.000	0	0	0	0	0	0	1	85	5.370.000	1	100	0	1	5.370.000	1	5.370.000	100	24.700	Kasubag PEP	Kasubag PEP
8		0101020106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (Dinas Satuan Kerja)	0	30.269.500	0	0	3	1.400.000	0	0	0	1	50	0	2	75	1.400.000	3	100	0	3	1.400.000	3	1.400.000	100	4.635	Kasubag PEP	Kasubag PEP
9		0101020107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Satuan Kerja)	0	32.750.000	0	0	3	9.832.650	0	25	0	1	50	0	1	75	7.802.650	3	100	0	3	7.802.650	3	7.802.650	100	23.825	Kasubag PEP	Kasubag PEP
10		01010202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dinas Satuan Kerja)	0	219.627.299.507	0	0	8	140.194.363.413	0	4	19.755.130.889	6	50	40.736.776.484	8	80.900	29.292.199.541	7	100	35.453.518.858	7	129.337.635.572	7	129.337.635.572	100	39.238	Kasubag Keuangan	Kasubag Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2023																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I				II				III				IV									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
29		010101200004	Penyusunan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan (Dengat Satuan Paket)	0	170.121.680	0	0	1	278.164.406	0	0	0	1	8.390	17.458.100	1	59.090	105.353.260	1	100	131.415.700	1	254.229.660	1	254.229.660	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
30		010101200005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengat Satuan Paket)	0	69.999.000	0	0	1	96.577.486	0	8	0	1	30	14.839.100	1	40.350	24.322.450	1	75	30.877.200	1	70.638.750	1	70.638.750	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
31		010101200006	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Pengadaan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perlengkapan Pengadaan yang Disediakan (Dengat Satuan Dokumen)	0	6.000.000	0	0	2	3.560.000	2	25	0	2	30	1.110.000	2	75	516.000	2	100	1.036.000	2	2.640.000	2	2.640.000	100	44	Kasubag Umum dan Kepegawaian
32		010101200009	Penyediaan dan Pengadaan Mesin dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Mesin dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	256.996.084	0	0	4	259.624.625	1	22	0	2	30	140.792.518	3	76	112.022.865	4	100	104.809.322	4	259.624.625	4	259.624.625	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
33		010101200010	Pemeliharaan dan Pengadaan Mesin dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Mesin dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	20.000.000	0	0	1	2.760.000	0	0	0	1	30	0	1	75	0	1	100	2.700.000	1	2.700.000	1	2.700.000	100	13,500	Kasubag Umum dan Kepegawaian
34		0101012007	Pengadaan dan Pengiriman Barang ke Kantor	Jumlah Pengiriman Barang ke Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	73.000.000	0	0	2	105.600.000	0	0	0	1	30	0	2	30	0	1	100	104.650.000	1	104.650.000	1	104.650.000	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
35		010101200006	Pengadaan dan Pengiriman Barang ke Kantor	Jumlah Pengiriman Barang ke Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	43.000.000	0	0	2	105.600.000	0	0	0	2	30	0	2	30	0	2	100	104.650.000	2	104.650.000	2	104.650.000	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
36		0101012008	Penyediaan Jasa Pengiriman Barang ke Kantor	Persentase Terpenuhi nya Penyediaan Jasa Pengiriman Barang ke Kantor	0	3.722.166.590	0	0	100	1.052.691.976	0	0	0	0	0	316.347.876	0	0	225.262.937	0	0	295.406.450	0	933.227.431	0	933.227.431	0	25,072	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pengiriman Barang ke Kantor	0	0	0	4	0	0	2	23	0	2	46	0	4	74.460	0	4	100	0	4	0	0	4	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
37		010101200001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengat Satuan Laporan)	0	20.000.000	0	0	1	10.000.000	0	30	0	1	50	4.450.000	1	75	1.400.000	1	100	750.000	1	6.600.000	1	6.600.000	100	33	Kasubag Umum dan Kepegawaian
38		010101200002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Logistik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, dan Logistik yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	1.209.600.000	0	0	12	205.600.000	3	25	0	6	50	25.435.848	9	75	40.246.623	12	100	52.838.879	12	178.521.350	12	178.521.350	100	14,759	Kasubag Umum dan Kepegawaian
39		010101200003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	49.500.000	0	0	1	52.500.000	0	10	0	1	34	14.450.000	1	72,836	16.500.000	1	100	21.550.000	1	52.500.000	1	52.500.000	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
40		010101200004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	2.443.066.390	0	0	1	785.191.976	0	25	0	25	30	212.012.028	1	75	167.116.314	1	100	224.269.571	1	695.606.081	1	695.606.081	100	28,473	Kasubag Umum dan Kepegawaian
41		0101012009	Pemeliharaan, Bersih, dan Perbaikan Kantor	Persentase Terpenuhi nya pemeliharaan dan perbaikan kantor (Dengat Satuan Laporan)	0	476.004.000	0	0	100	327.226.392	0	0	0	0	0	54.752.055	0	0	38.556.822	0	0	223.065.754	0	323.241.863	0	323.241.863	0	67,907	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Pengiriman Barang ke Kantor	0	0	0	4	0	0	2	20	0	2	30	0	4	58.680	0	4	100	0	4	0	0	4	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
42		010101200001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bersih, dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bersih, dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	242.916.000	0	0	7	119.746.596	0	30	3.466.615	7	50	34.434.131	7	62,420	24.338.898	7	100	54.024.522	7	116.286.167	7	116.286.167	100	47,872	Kasubag Umum dan Kepegawaian
43		010101200006	Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	36.000.000	0	0	4	27.579.000	0	20	0	3	31	14.250.000	3	83,830	9.150.000	8	100	4.055.000	8	27.455.000	8	27.455.000	100	75,164	Kasubag Umum dan Kepegawaian
44		010101200009	Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (Dengat Satuan Laporan)	0	167.094.000	0	0	1	179.500.596	0	30	3.378.615	0	50	6.067.924	1	30	5.067.924	1	100	164.965.232	1	179.500.596	1	179.500.596	100	100	Kasubag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (4)																							100,000			39,284			
PREDIKSI KINERJA																							97			58			

No	Suaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (KIU) dan Sub Indikator (SIS) (Setelah Indikator)	Target Kinerja (Anggaran Dasar Tahun 2022)		Realisasi Kinerja (Anggaran Dasar Tahun 2023)										Realisasi Kinerja (Anggaran Dasar Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja (Anggaran Dasar Tahun 2023)	Catatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Target Kinerja (Anggaran Dasar Tahun 2022)		Realisasi Kinerja (Anggaran Dasar Tahun 2023)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
77		010102020202	Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan	Jumlah Perbaikan Jalan yang selesai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (KIU) dan Sub Kegiatan (Kategori Indikator)	Target Kinerja dan Indikator Tambahan (Kategori Tambahan)	Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023												Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023	Target Capaian Kinerja dan Indikator Tambahan (Kategori Tambahan)	Unit Kerja/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PREDIKSI TENDENSI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
111		010104	PROG. KEMERDEKAAN DAN KEMAJUAN BANGSA	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	75	489.999.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Sasaran Indikator)	Target Kinerja dan Indikator Kinerja yang akan dicapai Tahun 2022	Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2023										Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Kinerja Persepsi APBD yang signifikan Tahun 2023	Realisasi Kinerja pada Anggaran Kinerja Persepsi APBD yang signifikan Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Kinerja Persepsi APBD yang signifikan Tahun 2023	Unit Kerja Persepsi APBD yang signifikan Tahun 2023					
						N																		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12	13	14	15
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
123		02220202002	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun	0	317.853.800	0	0	1	49.999.900	1	25	0	1	90	0	1	100	46.000.000	1	40.149.960	100	15.148	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun
124		02220202003	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun	0	0	0	0	3	75.100.000	0	10	0	0	30	0	10	100	46.118.000	10	46.118.000	100	100	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun
125		02220202003	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun	0	0	0	3	451.999.000	3	25	0	25	0	83,33	0	10	100	184.565.000	3	218.947.007	100	100	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun
126		02220202001	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun	0	0	0	4	93.999.150	2	25	0	2	40	85	0	4	100	10.861.000	4	90.138.247	100	100	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun
127		02220202002	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun	0	0	0	20	301.993.150	20	25	0	20	35	75	0	24	100	144.950.000	24	154.900.250	100	100	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun
128		02220202003	Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun	0	0	0	50	46.999.700	0	25	0	25	40	90	0	10	100	27.050.000	10	43.790.500	100	100	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																								
PREDIKSI TAHUN 2024																								
129		022204	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	100	297.613.390	0	0	100	90.871.345	25	25	0	40	100	12.791.332	100	91.354.096	100	81.134.096	100	27.235	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
130		022204001	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	217.413.390	0	0	2	90.871.345	2	25	0	40	100	12.792.225	2	81.134.096	2	81.134.096	100	27.235	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
131		022204001001	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	93.113.670	0	0	25	24.860.000	0	25	0	40	100	4.100.000	35	13.477.700	35	13.477.700	100	10.616	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
132		022204001002	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	204.489.720	0	0	25	66.011.340	6	25	0	40	100	8.792.225	25	67.880.296	25	67.880.296	100	32.217	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																								
PREDIKSI TAHUN 2024																								
133		022205	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	100	1.278.297.770	0	0	100	232.531.343	25	25	0	40	100	141.886.101	100	233.758.716	100	221.758.716	100	17.304	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
134		022205001	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	499.112.100	0	0	2	26.999.800	2	25	0	40	100	0	2	28.223.802	2	28.223.802	100	3.758	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
135		022205001001	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	102.431.000	0	0	5	14.899.946	5	25	0	40	100	0	5	13.348.900	5	13.348.900	100	6.937	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
136		022205001002	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	246.481.100	0	0	5	14.899.850	5	25	0	40	100	0	5	14.874.800	5	14.874.800	100	3.210	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
137		022205002	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	706.965.670	0	0	2	197.231.492	2	25	0	40	100	141.886.101	2	195.514.916	2	195.514.916	100	24.394	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	
138		022205002001	Program dan Kegiatan	Persentase Anggaran yang terdistribusikan	0	316.965.670	0	0	4	177.531.740	3	25	0	40	100	124.526.651	3	176.940.248	3	176.940.248	100	35.475	Subkegiatan yang signifikan Per Tahun	

Berdasarkan evaluasi atas Tabel T.C 26, rata-rata capaian kinerja Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja Renstra sebesar 80.43 Persen. Adapun untuk serapan anggaran, rata-rata realisasi anggaran bila dibandingkan dengan target anggaran pada Renstra sebesar sebesar 49.37 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan lembaga teknis yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pelayanan pendidikan dan kebudayaan di daerah khususnya di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **"menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan urusan bidang kebudayaan"**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang pendidikan dan kebudayaan;
4. Penetapan rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya pada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
6. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengukuran atas kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan. Pengukuran dilakukan atas ketercapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan dalam Renstra, untuk kemudian dibandingkan dengan realisasinya. Pada akhirnya, akan diperoleh rasio capaian indikator yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian indikator dimaksud. Berikut dijabarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 yang tergambar melalui tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya APM Pendidikan Dasar	1.1 APM SD	Persen	91	104,26	114,57
		1.2 APM SMP	Persen	69	60,18	87,22
2	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1 Persentase Cagar Budaya yang teregistrasi secara nasional	Persen	100	100	100
		2.2 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100	100	100
		2.3 Persentase Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	Persen	100	100	100

Dari tabel di atas, rata-rata capaian Urusan Pendidikan yang diwakili oleh indikator APM SD dan APM SMP sebesar 100 persen. Namun bila dilihat secara parsial, capaian APM SMP lebih kecil bila dibandingkan dengan capaian APM SD. Hal ini dikarenakan banyak penduduk usia SMP tercatat sudah berada di jenjang pendidikan SMA sehingga tidak terhitung ke dalam APM SMP. Untuk Urusan Kebudayaan, rata-rata capaian kinerja sudah mencapai 100%, yang diukur dari realisasi target kinerja indikator Persentase Cagar Budaya

yang teregistrasi secara nasional, Persentase Seni Budaya yang dilestarikan dan Persentase Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan.

Pencapaian target kedua sasaran strategis di atas diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang diampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Pencapaian target sasaran **"Meningkatnya APM Pendidikan Dasar"**, diupayakan melalui pelaksanaan Urusan Pendidikan, dengan program :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 8 (delapan) kegiatan;**
2. **Program Pengelolaan Pendidikan, dengan 4 (empat) kegiatan;**
3. **Program Pengembangan Kurikulum, dengan 1 (satu) kegiatan;**
4. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan 1 (satu) kegiatan;**
5. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, dengan 1 (satu) kegiatan.**

Sedangkan pencapaian target sasaran **"Meningkatnya Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda"**, diupayakan dicapai melalui pelaksanaan Urusan Kebudayaan dengan program :

1. **Program Pengembangan Kebudayaan, dengan 3 (tiga) kegiatan;**
2. **Program Pembinaan Sejarah, dengan 1 (satu) kegiatan;**
3. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan 2 (dua) kegiatan.**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

Isu-isu strategis yang berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dapat digali dan diidentifikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang yang terdapat dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan struktur organisasi, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang memiliki 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang terdiri :

1. Bidang Sekretariat;
2. Bidang Pembinaan Dikdas;
3. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
5. Bidang Kebudayaan.

Adapun secara detail, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel 23. berikut :

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang URUSAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - Jumlah Bidang = 4 - Jumlah Sekretariat = 1 - Jumlah Seksi/Subbag = 15 PENDIDIKAN FORMAL - Jumlah PAUD/TK Negeri = 8 - Jumlah PAUD/TK Swasta = 89 - Jumlah SD Negeri = 66 - Jumlah SD Swasta = 20 - Jumlah SMP Negeri = 10 - Jumlah SMP Swasta = 16 PENDIDIKAN NON FORMAL - Jumlah PKBM Negeri = 1 - Jumlah PKBM Swasta = 8 - Jumlah LKP = 50 KEBUDAYAAN - Jumlah Sanggar Budaya = 88 - Komunitas Film = 0 - Paguyuban = 22 - Jumlah Cagar Budaya = 46 - Jumlah Kesenian = 8 - Jumlah Tradisi = 26				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Index Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik belum maksimal	- PP No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik - Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Undang-Undang ASN No. 3 Tahun 2014 Tentang ASN - Permenpan No. 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya - Permenpan No. 14 Tahun 2010 Tentang Penilik dan Angka Kreditnya - Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan publik - Minimnya SDM yang memiliki sertifikat sesuai kompetensi - Rasio pengawas tidak sebanding dengan jumlah sekolah binaan - Rasio penilik tidak sebanding dengan jumlah lembaga binaan - Rasio pamong seni dan budaya tidak sebanding dengan lembaga binaan	- Kurangnya pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditetapkan - Kurangnya penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pengawas - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi penilik - Terbatasnya lembaga penyelenggara diklat bagi pamong seni dan budaya	1. Sekretariat Belum optimalnya : 1. Pemenuhan jabatan fungsional tertentu (penilik, pengawas, pamong) 2. Pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas pegawai 3. Pemenuhan kompetensi sebagai syarat menduduki jabatan tertentu (pejabat pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, Analis Perencanaan, Analis Keuangan) 4. Layanan umum sesuai standar pelayanan 5. Perekrutan pegawai pada jabatan tertentu belum sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam analisis jabatan 6. Penatausahaan Keuangan Sekolah 7. Penatausahaan Aset Sekolah 8. Evaluasi Perencanaan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Pend Dasar) belum maksimal Sarana prasarana pendidikan dasar belum optimal Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal belum mencapai 100%	Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan Minimal Pendidikan Permendiknas No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Prasarana PP No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan Minimal Pendidikan Akreditasi DIKDAS Kurikulum Merdeka ANBK (Asesmen Nasional)	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia bidang Sarana Prasarana DIKDAS 2. Validitas data kurang memadai 3. Pemahaman Peraturan tentang sarana prasarana yang masih rendah Pemenuhan terhadap 28 Indikator Pelayanan Dasar Pendidikan Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan Keterbatasan SDM diseksi kurikulum Minimnya jumlah guru pengger Belum maksimalnya Dukungan dan Pembinaan terhadap Pemenuhan 8	1. Keterbatasan Lahan dalam pemenuhan sarana prasarana sesuai standar 2. Minimnya peran serta masyarakat terhadap pemenuhan sarana prasarana yang berkualitas Letak Geografis Wilayah Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Propinsi Rendahnya manajemen Satuan Pendidikan Rendahnya pemahaman tentang kurikulum merdeka pada satuan pendidikan Belum optimalnya pelaksanaan proses pendidikan pada satuan	2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Belum optimalnya : 9. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS Pendidikan Dasar) 10. Angka Literasi dan Numerasi Siswa 11. Sekolah Terakreditasi A 12. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru 13. Pembinaan karakter Peserta Didik 14. Pengelolaan data PIP dan siswa kurang mampu 15. Penyediaan dan Pengelolaan Dana BOS 16. Capaian Kompetensi Siswa dalam Lomba-lomba 17. Pembinaan Penyusunan Dokumen Kurikulum DIKDAS 18. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran DIKDAS 19. Pengelolaan Penyelenggaraan Ujian DIKDAS 20. Sumber Daya dalam melakukan analisis terkait Kurikulum dan Penilaian 21. Pelayanan Perizinan Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan DIKDAS 22. Pembinaan dalam persiapan Akreditasi 23. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah 24. Keterlibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan DIKDAS 25. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka 26. Hasil ANBK

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	% SD Terakreditasi A baru 33% % SMP Terakreditasi A baru 56% Implementasi Kurikulum Merdeka belum terlaksana secara maksimal SD Negeri dan Swasta yang baru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka baru sebanyak 80 % SMP Negeri dan Swasta yang baru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka baru sebanyak 50 %	Berbasis Komputer) Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar teknis pelayanan Minimal Pendidikan 8 standar pendidikan yang ditetapkan oleh BAN PAUD DAN PNF Standar Proses: Permendikbud no 22 tahun 2016 Standar Penilaian: Permendikbud no 23 tahun 2016 Standar Isi: Permendikbud no 21 tahun 2016 Kriteria Kelulusan Program Pendidikan Guru Penggerak Permendikbudristek No. 262/M/2022 Perpres Nomor 68 Tahun 2022	standar nasional pendidikan Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan oleh Penilik dan Bidang PAUD Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan oleh Penilik dan Bidang PAUD Belum maksimalnya sosialisasi terhadap Program Pendidikan Guru Penggerak Belum maksimalnya sosialisasi terhadap Program Pendidikan Guru Penggerak Tidak dengan jelas disebutkan adanya tugas dan fungsi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dalam melakukan Pembinaan Kelembagaan LKP, dan hanya ada Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan	pendidikan Kurangnya minat orangtua murid untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD Satuan Pendidikan kurang melakukan promosi Lemahnya Kompetensi dan Pengetahuan Pengelola PKBM terhadap Pemenuhan 8 Standar Nasional Tidak Fokus Pengelola dalam mengelola Lembaga Pendidikan Kesetaraan Rendahnya Kompetensi Pengelola dalam mengelola Satuan Pendidikan Tidak ada Pengembangan Kurikulum di Satuan Pendidikan Rendahnya minat Para Guru untuk mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak Belum maksimalnya sosialisasi terhadap Program Pendidikan Guru Penggerak	3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Belum optimalnya: - Angka Partisipasi Sekolah PAUD - Capaian SPM PAUD - kualitas layanan administrasi terhadap Lembaga PAUD dan Kesetaraan. - Kompetensi pemberi layanan terhadap bidang layanan kepada Lembaga PAUD dan PNF. - Peralatan pendukung layanan yang tersedia. - Penerapan standar yang diberikan kepada Lembaga PAUD dan Kesetaraan. - Pemahaman terhadap sebuah peraturan dan ketentuan yang sudah ada.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hasil Asesmen Nasional belum maksimal Masih rendahnya capaian Angka Partisipasi Sekolah PAUD (APS PAUD) Masih rendahnya capaian SPM PAUD Persentase PKBM yang terakreditasi A dan B (0%)			Lembaga Kursus dan Pelatihan masuk dalam Rumpun Pendidikan Vokasi yang kewenangannya ada di Tingkat Provinsi	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Implementasi Kurikulum Lembaga Kesetaraan belum dilaksanakan secara komprehensif Belum Tersedianya Guru Penggerak Jenjang PAUD, dan baru memiliki 2 orang calon guru Penggerak Masih rendahnya Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang PAUD Tidak adanya Pembinaan				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kelembagaan pada pendidikan non formal dalam bentuk Lembaga Kursus dan Pelatihan				

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kualifikasi Tenaga Pendidik PAUD 54,52% Kualifikasi Tenaga Pendidik SD 80,43% Kualifikasi Tenaga Pendidik SMP 92,85% Tenaga Pendidik PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik 14,32% Tenaga Pendidik SD yang memiliki Sertifikat Pendidik 42,85% Tenaga Pendidik SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik 46,86%	Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Permendikbud No.37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat sampai Tahun 2015 Hasil Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	Kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan kebutuhan Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Kualifikasi Tenaga Pendidik belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku - Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap Tenaga Pendidik dalam mengikuti Uji Kompetensi - Belum maksimalnya pembinaan oleh Pejabat Fungsional	Adanya moratorium penerimaan CPNS Tenaga Pendidik Jumlah Formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbatas - Rendahnya motivasi Tenaga Pendidik dalam memenuhi kompetensi yang ditetapkan - Kemampuan Tenaga Pendidik dalam penggunaan TIK yang masih rendah	4. Bidang Pembinaan Ketenagaan Belum optimalnya : - Analisis kebutuhan tenaga pendidik dan Kependidikan disatuan pendidikan - Data pokok pendidikan dan Kebudayaan di Satuan Pendidikan serta lembaga Kebudayaan yang valid - Pemenuhan Kualifikasi Tenaga Pendidik - Pemenuhan Tenaga Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik - Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta pelaku budaya - Minat Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik dalam mengikuti kegiatan PTK Berprestasi - Pendayagunaan TIK (sarana pembelajaran dan bahan ajar) di Satuan Pendidikan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hasil Uji Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD dan DIKDAS masih dibawah nilai 70				

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 juga memperhatikan kesesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Hal ini dikarenakan Renja perangkat daerah merupakan penterjemahan pelaksanaan visi misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKPD sehingga harus terjalin kesesuaian/ kesinkronan satu sama lain. Berikut dijabarkan hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 yang ditampilkan pada tabel T.C 31 berikut ini :

Tabel TC 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pangkalpinang

Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN														
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				KODE REKENING						Bidang Urusan/ Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif	
						URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				146.106. 640.344						URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					146.106. 640.344			
						PENDIDIKAN				145.606. 866.144						PENDIDIKAN					145.606. 866.144			
1	1	1	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ KABUP ATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,5	Nilai	137.084. 616.234, 00	1	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH/ KAB UPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,5	Nilai	137.084. 616.234, 00				
							Indeks kepuasan pelayanan internal peragkat daerah	90	Nilai								Indeks kepuasan pelayanan internal peragkat daerah	90	Nilai					
	1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100	%	132.019. 668.684		1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100	%	132.019. 668.684			
	1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.157	oran g/bul an	131.981.6 68.684		1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.157	oran g/bul an	131.981.66 8.684			
	1	0	0	2	0	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1	doku men	4.000.000		1	0	0	2	0	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1	doku men	4.000.000			
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	doku men	25.000.00 0		1	0	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	doku men	25.000.000			
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	lapor an	5.000.000		1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	lapor an	5.000.000			

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN													
KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				KODE REKENING					Bidang Urusan/Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
							Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		1	doku men	4.000.000		1	0	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		1	doku men	4.000.000
	1	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN		100	%	50.000.000		1	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN		100	%	50.000.000
	1	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1	doku men	50.000.000		1	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1	doku men	50.000.000
	1	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100	%	517.907.250,00		1	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100	%	517.907.250,00
	1	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1	paket	12.995.000		1	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1	paket	12.995.000
	1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	paket	18.750.000		1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	paket	18.750.000
	1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Yang Tersedia		1	paket	199.997.950		1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Yang Tersedia		1	paket	199.997.950
	1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		1	paket	84.164.300		1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		1	paket	84.164.300
	1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	doku men	2.000.000		1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	doku men	2.000.000
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat		1	lapor an	200.000.000		1	0	0	2	0	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat		1	lapor an	200.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	KODE REKENING					Bidang Urusan/Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif
							Lo ka si	Target Capaian	Satu an										Lo ka si	Target Capaian	
	1	0	0	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah		100	%	74.000.000		1	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah		100	%	74.000.000	
	1	0	0	2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	unit	39.000.000		1	0	0	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	unit	39.000.000	
	1	0	0	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	unit	35.000.000		1	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	unit	35.000.000	
	1	0	0	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	4.249.984.000		1	0	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	4.249.984.000	
	1	0	0	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1	laporan	5.000.000		1	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1	laporan	5.000.000	
	1	0	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	laporan	160.000.000		1	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	laporan	160.000.000	
	1	0	0	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Laporan	35.000.000		1	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Laporan	35.000.000	
	1	0	0	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1	laporan	4.049.984.000		1	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1	laporan	4.049.984.000	
	1	0	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik		100	%	173.056.300		1	0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik		100	%	173.056.300	

RANCANGAN AWAL RKPD																HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			KODE REKENING						Bidang Urusan/Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif										Lo ka si		Target Capaian
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		7	unit	118.068.300		1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		7	unit	118.068.300
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang dipelihara		8	unit	25.000.000		1	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang dipelihara		8	unit	25.000.000
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi		1	unit	29.988.000		1	0	0	2	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi		1	unit	29.988.000
2	1	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					8.340.649.910	2	1	0	0		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					8.340.649.910	
							Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B		100%	%									Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B		100%		%
							Capaian SPM Pendidikan Dasar		100%	%									Capaian SPM Pendidikan Dasar		100%		%
							Capaian SPM Pendidikan PAUD		100%	%									Capaian SPM Pendidikan PAUD		100%		%
							Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan		100%	%									Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan		100%		%
							proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan).		100	%									proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan).		100		%
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1,90	%	5.146.468.410		1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1,90	%	5.146.468.410

RANCANGAN AWAL RKPD																				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			KODE REKENING						Bidang Urusan/ Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025								
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si	Target Capaian		Satu an	Pagu Indikatif			
							Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		1,70	%								Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		1,70	%						
							Persentase satuan pendidikan berakreditasi B		100%	%								Persentase satuan pendidikan berakreditasi B		100%	%						
							Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		68%	%								Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		68%	%						
							Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV		87%	%								Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV		87%	%						
	1	0	0	2	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		2	unit	1.160.000.000		1	0	0	2	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		2	unit	1.160.000.000				
	1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli		50	paket	2.599.998.410		1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli		50	paket	2.599.998.410				
	1	0	0	2	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik		1.100	peserta didik	74.750.000,00		1	0	0	2	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik		1.100	peserta didik	74.750.000,00				
	1	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		90	orang	40.000.000,00		1	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		90	orang	40.000.000,00				
	1	0	0	2	0	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50	Orang	49.320.000,00		1	0	0	2	0	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50	Orang	49.320.000,00				
	1	0	0	2	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	dokumen	40.000.000		1	0	0	2	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	dokumen	40.000.000				

RANCANGAN AWAL RKPD											HASIL ANALISIS KEBUTUHAN												
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			KODE REKENING						Bidang Urusan/ Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si	Target Capaian		Satu an
	1	0	0	2	0	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2	doku men	29.800.000		1	0	0	2	0	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2	doku men	29.800.000
	1	0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		550	Paket	157.700.000		1	0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		550	Paket	157.700.000
	1	0	0	2	0	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi		7	unit	50.000.000,00		1	0	0	2	0	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi		7	unit	50.000.000,00
	1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		224	Oran g	59.900.000		1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		224	Oran g	59.900.000
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian		90	Satua n Pendi dikan	30.000.000,00		1	0	0	2	0	Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian		90	Satua n Pendi dikan	30.000.000,00
	1	0	0	2	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		4	ruan g	440.000.000		1	0	0	2	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		4	ruan g	440.000.000
	1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		650	peser ta didik	415.000.000,00		1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		650	peser ta didik	415.000.000,00
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1,8	Pers en	2.565.210.000		1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1,8	Pers en	2.565.210.000
							Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		2,2	Pers en									Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		2,2	Pers en	
							Persentase satuan pendidikan berakreditasi B		100%	%									Persentase satuan pendidikan berakreditasi B		100%	%	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	KODE REKENING					Bidang Urusan/Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif
							Lo ka si	Target Capaian	Satu an										Lo ka si	Target Capaian	
						Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah menengah pertama		91%	%							Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah menengah pertama		91%	%		
						Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV		91%	%							Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV		91%	%		
1	0	0	2	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun		2	unit	275.000.000		1	0	0	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun		2	unit	275.000.000
1	0	0	2	0	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		4	ruan g	350.000.000		1	0	0	2	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		4	ruan g	350.000.000
1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli		20	paket	1.252.500.000		1	0	0	2	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli		20	paket	1.252.500.000
1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		400	peser ta didik	310.000.000		1	0	0	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		400	peser ta didik	310.000.000
1	0	0	2	0	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik		405	peser ta didik	63.910.000		1	0	0	2	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik		405	peser ta didik	63.910.000
1	0	0	2	0	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50	oran g	49.860.000		1	0	0	2	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50	oran g	49.860.000
1	0	0	2	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	Doku men	40.000.000		1	0	0	2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	Doku men	40.000.000
1	0	0	2	0	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang		1	Doku men	29.800.000		1	0	0	2	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	Doku men	29.800.000

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKP										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN												
KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
							Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif
						dilaksanakan									pendidikan							
1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian		26	Satua n Pendi dikan	40.000.00 0		1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian		26	Satua n Pendi dikan	40.000.000
1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang		105	Oran g	59.900.00 0		1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang		105	Oran g	59.900.000
1	0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	umlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		400	paket	94.240.00 0		1	0	0	2	0	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	umlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		400	paket	94.240.000
1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C		75%	%	384.023. 500,00		1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C		75%	%	384.023. 500,00
				Angka melanjutkan siswa PAUD			50%	%							Angka melanjutkan siswa PAUD			50%	%			
				Persentase guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV			68%	%							Persentase guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV			68%	%			
1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik		432	peser ta didik	160.000.0 00,00		1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik		432	peser ta didik	160.000.00 0,00
1	0	0	2	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		112	Satua n Pendi dikan	49.994.00 0		1	0	0	2	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		112	Satua n Pendi dikan	49.994.000
1	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD		112	Oran g	24.029.50 0		1	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD		112	Oran g	24.029.500

RANCANGAN AWAL RKPD																HASIL ANALISIS KEBUTUHAN										
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						KODE REKENING						Bidang Urusan/ Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif								Lo ka si			Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif		
	1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		112	Oran g	50.000.00 0,00		1	0	0	2	0	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		112	Oran g	50.000.000 ,00			
	1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat /Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2	unit	100.000.0 00,00		1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sedang/Berat /Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas PAUD yang direhabilitasi sedang/berat		2	unit	100.000.00 0,00			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Keset araan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C		78%	%	244.948. 000		1	0	0	2	0	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ K esetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C	78%	%	244.948. 000				
	1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik		110	peser ta didik	70.000.00 0		1	0	0	2	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik		110	peser ta didik	70.000.000			
	1	0	0	2	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetara an	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen		9	Satua n Pendi dikan	49.959.00 0		1	0	0	2	0	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kese taraan	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen		9	Satua n Pendi dikan	49.959.000			
	1	0	0	2	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	Doku men	84.989.00 0		1	0	0	2	0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	Doku men	84.989.000			
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetara an	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar		493	peser ta didik	40.000.00 0,00		1	0	0	2	0	Penyelenggaraa n Proses Belajar Nonformal/Kese taraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar		493	peser ta didik	40.000.000 ,00			
3	1	0	0	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah megembangkan kurikulum muatan lokal		100	%	30.000.0 00		3	1	0	0		PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah megembangkan kurikulum muatan lokal		100	%	30.000.0 00			

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN													
KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				KODE REKENING					Bidang Urusan/ Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
							Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif		
	1	0	0	2	0	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan		90	doku men	30.000.000		1	0	0	2	0	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan		90	doku men	30.000.000
	1	0	0	2	0	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		90	oran g	30.000.000		1	0	0	2	0	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		90	oran g	30.000.000
4	1	0	0	2	0	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV		88%	%	96.600.000	4	1	0	0	2	0	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV		88%	%	96.600.000
							Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV		52%	%									Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV		52%	%	
							Rasio Pengawas dan Penilik PAUD		11%	%									Rasio Pengawas dan Penilik PAUD		11%	%	
	1	0	0	2	0	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar		80%	pers en	96.600.000		1	0	0	2	0	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar		80%	pers en	96.600.000
	1	0	0	2	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	doku men	48.300.000		1	0	0	2	0	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1	doku men	48.300.000

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN																		
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			KODE REKENING						Bidang Urusan/ Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif						
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si	Target Capaian		Satu an					
	1	0	0	2	0	Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependika n bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1	lapor an	48.300.00 0		1	0	0	2	0	0	0	0	1	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependi dikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan TenagaKependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1	lapor an	48.300.000
5	1	0	0			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional		100%	%	55.000.0 00	5	1	0	0		PROGRAM PENGENDALI AN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional		100%	%	55.000.0 00						
							Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional		86%	%								Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional		86%	%							
	1	0	0	2		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar		100	%	20.000.0 00,00		1	0	0	2		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggara kan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar		100	%	20.000.0 00,00					
	1	0	0	2	0	Penilaian Kelayakan Usul PerizinanPendidikan Dasaryang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	doku men	10.000.00 0,00		1	0	0	2	0	0	0	1	1	Penilaian Kelayakan Usul PerizinanPendidi kan Dasaryang diselenggaraka n oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	doku men	10.000.000 ,00	
	1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	doku men	10.000.00 0,00		1	0	0	2	0	0	0	1	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	doku men	10.000.000 ,00	

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN													
KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			KODE REKENING					Bidang Urusan/Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif			
							Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si		Target Capaian	Satu an	
	1	0	0	2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal		100,00 %		35.000.000,00		1	0	0	2		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal		100,00 %		35.000.000,00
	1	0	0	2	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	doku men	20.000.000,00		1	0	0	2	0	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	doku men	20.000.000,00
	1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	doku men	15.000.000,00		1	0	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	doku men	15.000.000,00
						INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA												INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA					
						INDEKS PENDIDIKAN		0,712	Nilai									INDEKS PENDIDIKAN		0,712	Nilai		
						Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan		100%	%									Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan		100%	%		
						Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional		80%	%									Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional		80%	%		

RANCANGAN AWAL RKPD																				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				KODE REKENING						Bidang Urusan/Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif										Lo ka si	Target Capaian	Satu an		Pagu Indikatif		
							Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan		80%	%									Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan		80%	%					
						KEBUDAYAAN				499.774.200							KEBUDAYAAN					499.774.200					
6	2	2	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarkan		60	Pers en	304.791.000,00	6	2	2	0	2		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarkan		60	Pers en	304.791.000,00				
	2	2	0	2	0	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang		100%	%	75.000.000		2	2	0	2	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang		100%	%	75.000.000					
	2	2	0	2	0	Perindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kabudayaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		6	Obje k	75.000.000,00		2	2	0	2	Perindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kabudayaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		6	Obje k	75.000.000,00					
	2	2	0	2	0	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang		100%	%	154.791.000,00		2	2	0	2	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang		100%	%	154.791.000,00					
	2	2	0	2	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		7	Obje k	79.800.000		2	2	0	2	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		7	Obje k	79.800.000					

RANCANGAN AWAL RKPD																HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			KODE REKENING						Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				
								Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif
	2	2	0	2	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		1	Lapor an	74.991.00 0		2	2	0	2	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		1	Lapor an	74.991.000
	2	2	0	2	0	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang		100%	Lemb aga	75.000.0 00,00		2	2	0	2		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ K ota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang		100%	Lemb aga	75.000.0 00,00
	2	2	0	2	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		3	Obje k	75.000.00 0,00		2	2	0	2	0	Pelindungan, Pengembangan , Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		3	Obje k	75.000.000 ,00
8	2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan		60	Pers en	50.000.0 00,00	8	2	2	0			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan		60	Pers en	50.000.0 00,00
	2	2	0	2	0	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang		100%	%	50.000.0 00		2	2	0	2		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ K ota	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang		100%	%	50.000.0 00
	2	2	0	2	0	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang yang Diberdayakan		100	Oran g	50.000.00 0,00		2	2	0	2	0	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/ Kot a	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang yang Diberdayakan		100	Oran g	50.000.000 ,00

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN											
KODE REKENING					Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			KODE REKENING					Bidang Urusan/Progr am/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	
							Lo ka si	Target Capaian	Satu an	Pagu Indikatif									Lo ka si		Target Capaian
9	2	2	0		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola		80%	Pers en	144.983. 200	9	2	2	0		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAA N CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarikan dan dikelola		80%	Pers en	144.983. 200
			5																		
	2	2	0	2	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang		10	%	69.995.00 0		2	2	0	2	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/K ota	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang		10	%	69.995.000
			5	0 1																	
	2	2	0	2	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan		5	Obje k	19.995.00 0		2	2	0	2	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan		5	Obje k	19.995.000
	2	2	0	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan		10	Obje k	50.000.00 0,00		2	2	0	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan		10	Obje k	50.000.000 ,00
			5	0 1																	
	2	2	0	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang		100%	%	74.988.20 0,00		2	2	0	2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/K ota	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang		100%	%	74.988.200 ,00
			5	0 2																	
	2	2	0	2	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi		4	Obje k	74.988.20 0		2	2	0	2	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi		4	Obje k	74.988.200
			5	0 2																	

Hasil review menunjukkan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD telah mengakomodir Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dikarenakan dalam proses penyusunannya, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 telah berpedoman kepada Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sehingga terwujud sinkronisasi perencanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan Renstra mempertimbangkan juga kajian dari sisi aspek kebijakan nasional khususnya terhadap Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Sehubungan tugas tersebut, maka pemerintah daerah dalam hal urusan pendidikan dan kebudayaan sudah semestinya mengacu kepada tujuan strategis kementerian terkait, agar pemajuan pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan secara selaras, sejalan, dan berkesinambungan mulai dari daerah hingga ke pusat. Untuk mendukung tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana dijabarkan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kewenangannya mendukung pemajuan pendidikan di ranah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Kesetaraan, serta pembinaan sejarah, pengembangan kebudayaan serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

3.1.1.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Penentuan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ditentukan berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

Visi di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya, juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama:

- 1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia
- 2) Berkebinekaan global Pelajar

- 3) Bergotong royong
- 4) Mandiri
- 5) Bernalar
- 6) Kreatif

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang menjadi fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewarganegaraan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Dalam kurun waktu 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbud terus memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikan kepastian landasan hukum untuk

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai - nilai, tradisi, dan sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. Semakin maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pariwisata menyokong pembangunan ekonomi, stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan industri membangun insan-insan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi zaman dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupun global tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan, yang merupakan komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian berbagai warisan budaya baik yang bersifat benda maupun tak benda perlu disokong secara holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan peningkatan diplomasi budaya agar budaya Indonesia lebih dikenal di kancah internasional. Dalam upaya mendukung visi Kemendikbud tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang menyusun rencana pemajuan kebudayaan di Kota Pangkalpinang melalui upaya-upaya berikut :

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya di Kota Pangkalpinang;
2. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya di Kota Pangkalpinang;
3. Pembinaan Sejarah Lokal dalam Kota Pangkalpinang;
4. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota Pangkalpinang;
5. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kota Pangkalpinang.

3.1.1.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi Presiden, sesuai tugas dan kewenangannya Kemendikbud melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan

pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

3.1.1.3 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud menetapkan lima tujuan diantaranya :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan;
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan tujuan Kemendikbud di atas yang diupayakan untuk memaksimalkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di seluruh daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang juga menetapkan tujuan yang mendukung tujuan dimaksud dengan upaya:

1. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah.
2. Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda.

3.1.1.4 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Sasaran Strategis Kemendikbud ditetapkan sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan sasaran stretegis Kemendikbud dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang telah menetapkan sasaran berupa meningkatnya harapan dan rata-rata lama sekolah, serta meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi nasional pembangunan pendidikan dan kebudayaan dituangkan dalam Visi Presiden 2020-2024, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun perwujudan visi

dimaksud berupa “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut kemudian diterjemahkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai **Nawacita Kedua**. Dengan memegang prinsip pengarusutamaan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, perumusan misi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mensukseskan pencapaian misi, Presiden telah menetapkan arahan-arahan pembangunan. Pada misi yang pertama yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, Presiden menetapkan arahan pembangunan melalui strategi pencapaian **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)”**, dengan memperkuat penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, dimana **aspek pendidikan** termasuk salah satu diantaranya. Selain penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, upaya pembangunan karakter juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam strategi peningkatan kualitas manusia Indonesia, dimana **pemajuan dan pelestarian kebudayaan** menjadi salah satu langkah strategis di dalamnya. Adapun salah satu target pembangunan pendidikan yang ditetapkan Presiden hingga tahun 2024 adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,18 tahun. Ini berarti, ditargetkan seluruh penduduk pada usia dimaksud dapat melampaui

jenjang pendidikan menengah hingga tuntas. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebudayaan juga ditargetkan mencapai 62,7 persen.

Dalam upaya untuk mencapai keberhasilan pencapaian misi, Presiden juga telah menetapkan **7 (tujuh) agenda pembangunan**, dimana dua di antaranya mewakili upaya peningkatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yaitu "**Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**" serta "**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**". Pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menitikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas, sedangkan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, serta pembangunan etos kerja.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Adapun Tujuan dari Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Rumusan Tujuan
1	2	3
1	➤ Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD (capaian APS SD Tahun 2023 sebesar 122.72 persen); ➤ Belum optimalnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP (capaian APS SMP Tahun 2023 sebesar 78.5 persen);	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah
2	➤ Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian budaya benda dan tak benda di Kota Pangkalpinang.	Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda

Sasaran yang ingin dicapai dari Tujuan Meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah **Meningkatnya APS Pendidikan Dasar**, dengan indikator APS SD dan SMP. Berdasarkan data capaian terakhir isu strategis, APS SD dan SMP Tahun 2023 masing-masing sebesar 122.72 dan 78.5 persen.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dari Tujuan melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda adalah **Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda**, dengan indikator Persentase Pelestarian Budaya Benda dan Benda.

Tabel 3.2.
Keselaran Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Pembangunan
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	
1	2	3		4	5	
1.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1.	APS SD
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah		1.1.2.	APS SMP
2.	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	2.1	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional
					2.1.2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan

Secara lengkap sasaran serta target Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.
Sasaran dan Target Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi Tahun 2021	TARGET KINERJA SASARAN		
							Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
							Target	Target	Target
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1.	<i>APS SD</i>	<i>persen</i>	99,70	99,80	99,90	100,00
			1.1.2.	<i>APMSSMP</i>	<i>persen</i>	98,90	90,00	90,2	90,25
2.	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	<i>Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional</i>	<i>persen</i>	61	70	80	91
			2.1.2	<i>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan</i>	<i>persen</i>	60	70	80	90

Untuk urusan kebudayaan, target indikator sasaran yang ditetapkan berupa persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional dan persentase objek pemajuan kebudayaan yang dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional;

Hingga akhir periode Renstra yaitu tahun 2026, jumlah cagar budaya yang direncanakan akan diregistrasi secara nasional berjumlah 46 unit. Pencapaian target tersebut direncanakan bertahap dari tahun 2024 hingga tahun 2026.

2. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan;

Hingga akhir periode Renstra yaitu tahun 2026, jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan di Kota Pangkalpinang ditargetkan sebanyak 10 jenis. Pencapaian target tersebut direncanakan bertahap dari tahun 2014 hingga tahun 2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan

Dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan –

pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan program prioritas kepala daerah terpilih. Adapun beberapa pertimbangan tersebut diantaranya diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu visi kepala daerah terpilih adalah meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berdasar hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang berupaya memformulasikan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kondisi tersebut. Salah satunya

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pendidikan merupakan salah satu target pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam program SDGs hingga tahun 2030. Pada tujuan ke empat disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan adalah tercapainya Pembangunan Berkualitas, dengan memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Diharapkan, program dan kegiatan yang direncanakan berdampak positif bagi pencapaian tujuan SDGs 2030.

3. Pengentasan Kemiskinan

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah. Oleh karena itulah, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK)

secara tidak langsung menjadi strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, pemerataan kesempatan belajar, serta pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang layak berpengaruh besar dalam penentuan kualitas pendidikan masyarakat. Semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak pada saat usia aktif bekerja nanti.

4. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan)

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebelumnya diatur dalam amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota. Amanat SPM menurut peraturan tersebut lebih menitikberatkan pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di daerah, berikut juga tentang dukungan ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten. Peraturan menteri tersebut kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, aturan SPM terbaru menitikberatkan apa saja pelayanan minimal yang wajib dipenuhi pemerintah daerah kepada peserta didik, baik yang ikut serta pada satuan pendidikan negeri maupun swasta. Peraturan Menteri ini kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan

pemerintahan fungsi penunjang pendidikan dan kebudayaan Tahun 2025 dijabarkan dalam tabel rencana program dan kegiatan berikut ini :

Tabel TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang
Tahun 2025

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					146.106.640.344	
PENDIDIKAN					145.606.866.144	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		73,5	Nilai	137.084.616.234,00	Sekretaris DIKBUD
	Indeks kepuasan pelayanan internal perangkat daerah		90	Nilai		Sekretaris DIKBUD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP		100	%	132.019.668.684	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		1.157	orang/bulan	131.981.668.684	
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD		1	dokumen	4.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		1	dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1	laporan	5.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		1	dokumen	4.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN		100	%	50.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai		1	dokumen	50.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100	%	517.907.250,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1	paket	12.995.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	paket	18.750.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Yang Tersedia		1	paket	199.997.950	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan		1	paket	84.164.300	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	dokumen	2.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat		1	laporan	200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah		100	%	74.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		1	unit	39.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	unit	35.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	%	4.249.984.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		1	laporan	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1	laporan	160.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1	Laporan	35.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1	laporan	4.049.984.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik		100	%	173.056.300	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		7	unit	118.068.300	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang dipelihara		8	unit	25.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi		1	unit	29.988.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					8.340.649.910	
	Persentase satuan pendidikan negeri berakreditasi minimal B		100%	%		KABID PEMBINAAN DIKDAS
	Capaian SPM Pendidikan Dasar		100%	%		
	Capaian SPM Pendidikan PAUD		100%	%		KABID PEMBINAAN PAUD DAN PNF
	Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan		100%	%		
	proporsi lulusan program guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas/penilik (paud/sd/smp/kesetaraan).		100	%		KABID PEMBINAAN KETENAGAAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		1,90	%	5.146.468.410	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		1,70	%		Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
	Persentase satuan pendidikan berakreditasi B		100%	%		Kasi Saprasi Dikdas
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		68%	%		Kasi Kesiswaan
	Persentase guru Sekolah Dasar yang berkualifikasi S1/DIV		87%	%		Kasi GTK Dikdas
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		2	unit	1.160.000.000	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli		50	paket	2.599.998.410	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik		1.100	peserta didik	74.750.000,00	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		90	orang	40.000.000,00	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50	Orang	49.320.000,00	SPM
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	dokumen	40.000.000	SPM
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2	dokumen	29.800.000	SPM
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		550	Paket	157.700.000	SPM
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi		7	unit	50.000.000,00	

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		224	Orang	59.900.000	SPM
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian		90	Satuan Pendidikan	30.000.000,00	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		4	ruang	440.000.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		650	peserta didik	415.000.000,00	SPM
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		1,8	Persen	2.565.210.000	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		2,2	Persen		Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar
	Persentase satuan pendidikan berakreditasi B		100%	%		Kasi Saproas Dikdas
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah menengah pertama		91%	%		Kasi Kesiswaan
	Persentase guru Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi S1/DIV		91%	%		Kasi GTK Dikdas
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun		2	unit	275.000.000	
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat		4	ruang	350.000.000	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli		20	paket	1.252.500.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		400	peserta didik	310.000.000	SPM

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti ajang kompetensi/lomba akademik dan non akademik		405	peserta didik	63.910.000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50	orang	49.860.000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	Dokumen	40.000.000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	Dokumen	29.800.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan proses belajar dan ujian		26	Satuan Pendidikan	40.000.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang		105	Orang	59.900.000	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	umlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		400	paket	94.240.000	SPM
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C		75%	%	384.023.500,00	Kasi Saprass Paud dan PNF
	Angka melanjutkan siswa PAUD		50%	%		Kasi PAUD
	Persentase guru PAUD yang berkualifikasi S1/DIV		68%	%		Kasi GTK PAUD
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang menerima biaya personil peserta didik		432	peserta didik	160.000.000,00	SPM
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			Satuan Pendidikan	49.994.000	SPM

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD			Orang	24.029.500	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		112	Orang	50.000.000,00	
Rehabilitasi Sedang/Berat /Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas PAUD yang direhabilitasi sedang/berat		2	unit	100.000.000,00	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Proporsi Jumlah Satuan PNF yang Mendapatkan Minimal Akreditasi C		78%	%	244.948.000	Kasi Saprass Paud dan PNF
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik		110	peserta didik	70.000.000	SPM
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen		9	Satuan Pendidikan	49.959.000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1	Dokumen	84.989.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar		493	peserta didik	40.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal		100	%	30.000.000	KABID PEMBINAAN DIKDAS
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan		90	dokumen	30.000.000	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		90	orang	30.000.000	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1/DIV		88%	%	96.600.000	KABID KETENAGAAN PEMBINAAN
	Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV		52%	%		KABID KETENAGAAN PEMBINAAN
	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD		11%	%		KABID KETENAGAAN PEMBINAAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rasio Pemenuhan Pendidik Jenjang Pendidikan Dasar		80%	persen	96.600.000	Kasi Data dan TIK
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1	dokumen	48.300.000	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		1	laporan	48.300.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Memiliki Izin Operasional		100%	%	55.000.000	KABID PEMBINAAN DIKDas
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang Memiliki Izin Operasional		86%	%		KABID PEMBINAAN PAUD dan PNF

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar		100	%	20.000.000,00	Kasi Supras Dikdas
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	dokumen	10.000.000,00	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	dokumen	10.000.000,00	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan izin Operasional Satuan PAUD dan Pendidikan Non Formal		100,00%	%	35.000.000,00	Kasi Supras Paud dan PNF
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat terverifikasi		1	dokumen	20.000.000,00	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	dokumen	15.000.000,00	
	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA					KEPALA DAERAH
	INDEKS PENDIDIKAN		0,712	Nilai		KEPALA DAERAH
	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan		100%	%		Ka DIKBUD

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
	Persentase Cagar budaya yang terregistrasi secara nasional		80%	%		Ka DIKBUD
	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan		80%	%		Ka DIKBUD
KEBUDAYAAN					499.774.200	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang yang di Lestarkan		60	Persen	304.791.000,00	KABID KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan Daerah Kota Pangkalpinang		100%	%	75.000.000	
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kabudayaan yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		6	Objek	75.000.000,00	
Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Objek Kesenian tradisional Kota Pangkalpinang		100%	%	154.791.000,00	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		7	Objek	79.800.000	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		1	Laporan	74.991.000	
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Kota Pangkalpinang		100%	Lembaga	75.000.000,00	

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
		Lokasi	Target Capaian	Satuan		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		3	Objek	75.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Jumlah SDM yang dibina dan Objek Sejarah Daerah Kota Pangkalpinang yang dilestarikan		60	Persen	50.000.000,00	KABID KEBUDAYAAN
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan SDM Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang		100%	%	50.000.000	
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kota Pangkalpinang yang Diberdayakan		100	Orang	50.000.000,00	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang yang di Lestarkan dan dikelola		80%	Persen	144.983.200	KABID KEBUDAYAAN
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) Kota Pangkalpinang		10	%	69.995.000	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang didaftarkan		5	Objek	19.995.000	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan		10	Objek	50.000.000,00	
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Benda, bangunan/gedung, situs dan kawasan Cagar Budaya (CB) peringkat Kota Pangkalpinang		100%	%	74.988.200,00	
Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi		4	Objek	74.988.200	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 diusulkan untuk dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut:

Urusan/Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan
URUSAN PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN KOTA
Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dasar
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Keg. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Keg. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Pengadaan Mebel Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
Keg. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat /Ruang Kelas Sekolah
Keg. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Keg. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Keg. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Keg. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Keg. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
URUSAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Keg. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Keg. Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
Keg. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
Keg. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Keg. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya
Keg. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Perlindungan Cagar Budaya

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan-catatan Penting

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang untuk tahun 2025, sekaligus sebagai gambaran pelaksanaan RKPD Kota Pangkalpinang untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Beberapa tugas penting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat terkait dengan isu-isu strategis nasional seperti :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Pendidikan
2. Pencapaian SPM Pendidikan
3. Pencapaian Salah Satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)
4. Pencapaian Salah Satu Upaya Tidak Langsung dalam Pengentasan Kemiskinan

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan ini diupayakan mengakomodir isu-isu strategis di atas dan dimaksimalkan untuk pencapaian indikator yang menjadi kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak maksimalnya pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta tentunya berpengaruh pula pada kebijakan – kebijakan Pemerintah Pusat yang akan diambil untuk Pendidikan di Kota Pangkalpinang. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dijabarkan melalui tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran		Penanggung Jawab
1	2	3		4	5		
1.	Meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama sekolah	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya APS Pendidikan Dasar	1.1.1.	APS SD	Kadin DIKBUD
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah		1.1.2.	APS SMP	Kadin DIKBUD
2.	Melindungi, dan melestarikan budaya benda dan tak benda	2.1	Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	Meningkatnya pelestarian budaya benda dan tak benda	2.1.1	Persentase cagar budaya yang terregistrasi secara nasional	Kadin DIKBUD
					2.1.2	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Kadin DIKBUD

5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan acuan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Kota Pangkalpinang 2025.
2. Renja Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
3. Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusulkan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selaras dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025. Diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Renja ini dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pangkalpinang Tahun 2024-2026. Apabila dalam perjalanannya terdapat kebutuhan yang bersifat urgen dan mendesak namun tidak terencana dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengusulkan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 kepada Bappeda dan Litbang melalui mekanisme penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Pangkalpinang, Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PANGKALPINANG,



ERWANDY, SE., MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197207202006041004

TERIMA KASIH